



BPKPD

DOKUMEN CASCADING

TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

e-mail : bpkpd@bulelengkab.go.id
website : www.bpkpd.bulelengkab.go.id

**CASCADING KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	KABID. PERENCANAAN ANGGARAN	Terwujudnya penyusunan anggaran daerah	Persentase penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu	KASUBBID. PERENCANAAN DAERAH	1 Tersusunnya Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS	1 Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS
						2 Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Jumlah SKPD memperoleh Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
					KASUBBID. PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEUANGAN	1 Tersusunnya bahan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Jumlah Laporan bahan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
						2 Tersusunnya laporan bahan dan informasi Kebijakan Bidang Anggaran	2 Jumlah Laporan bahan dan informasi Kebijakan Bidang Anggaran
	JABATAN FUNGSIONAL-ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	1 Terlaksananya Pengesahan APBD tepat waktu	1 Jumlah Laporan Penyusunan APBD, dan Perubahan APBD				
	KABID. PERBENDAHARAAN	Meningkatnya pelayanan perbendaharaan daerah yang baik	Persentase pelayanan perbendaharaan daerah	KASUBBID. MANAJEMEN KAS	1 Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Jumlah Dokumen BKU BUD yang terbit	

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
						2 Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
						3 Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
						4 Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
						5 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
						6 Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
					KASUBBID. BELANJA	1 Terlaksananya pencairan SP2D belanja SKPD tepat waktu	1 Jumlah laporan pencairan SP2D tepat waktu
						2 Terlaksana Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Jumlah laporan hasil pembinaan SKPD
					JABATAN FUNGSIONAL-ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	1 Terlaksananya pengolahan dan analisis data Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa	1 Jumlah laporan dana perimbangan sesuai syarat salur tepat waktu
						2 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi data Dana Perimbangan, Dana Transfer lainnya dan Dana Desa	2 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
						3 Tersedianya informasi keuangan daerah dari Dana Perimbangan, Dana Transfer lainnya dan Dana Desa	3 Jumlah laporan data statistik keuangan dari Dana Perimbangan, Dana Transfer lainnya dan Dana Desa
						4 Terlaksananya penyaluran Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Partai Politik, Belanja Transfer ke Desa dan Dana Darurat dan Mendesak	4 Jumlah laporan penyaluran Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Partai Politik, Belanja Transfer ke Desa dan Dana Darurat dan Mendesak tepat waktu
		KABID. AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	KASUBBID. AKUNTANSI	1 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
						2 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
						3 Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Jumlah Dokumen draf Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
					KASUBBID. PELAPORAN	1 Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah
				2 Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		2 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	
				3 Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		3 Jumlah Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
						4 Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik	KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	KASUBBID. ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN	1 Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
						2 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
						3 Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
						4 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Jumlah Laporan Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah
						5 Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
						6 Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	6 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
						7 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7 Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
					KASUBBID. PENGAMANAN DAN PENILAIAN	1 Tersedianya Standar Harga	1 Jumlah Standar Harga yang Disusun
						2 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah
						3 Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	3 Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah yang diusulkan tepat waktu
					JABATAN FUNGSIONAL-PENILAI PEMERINTAH	1 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan BMD
						2 Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Jumlah laporan pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan yang telah diproses sesuai usulan tepat waktu
1. Terwujudnya PAD yang sesuai target	Jumlah realisasi PAD	KABID. PENDATAAN DAN PELAYANAN	Terwujudnya pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	Persentase Pendataan PAD, Persentase Pelayanan PAD, dan Persentase Dokumen Kebijakan Pendapatan Daerah	KASUBBID. PENDATAAN	1 Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah
						2 Tersedianya Data Penetapan Wajib Pajak Daerah	2 Jumlah Laporan Penetapan Wajib Pajak Daerah

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
					KASUBBID. PELAYANAN	1 Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah tepat waktu
					JABATAN FUNGSIONAL-PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Rencana/Rancangan Pengelolaan Pajak Daerah
				2 Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		2 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	
				3 Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		KABID. PENAGIHAN DAN EVALUASI	Terwujudnya penagihan dan evaluasi pendapatan daerah	Persentase penagihan pajak daerah dan evaluasi pendapatan daerah	KASUBBID. VERIFIKASI KEBERATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK	1 Tersedianya data kepatuhan wajib pajak	1 Jumlah laporan analisa resiko dan evaluasi pelaporan pajak daerah
						2 Terlaksananya Pelayanan atas Keberatan dan Pengurangan nilai Pajak Daerah	2 Jumlah laporan pelayanan keberatan dan pengurangan nilai pajak tepat waktu
						3 Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	3 Jumlah Laporan Data Pemeriksaan Pajak Daerah

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
					KASUBBID. PENAGIHAN PAJAK DAERAH	1 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	1 Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah
						2 Terlaksananya pemungutan piutang pajak daerah	2 Jumlah wajib pajak tertagih tepat waktu
					JABATAN FUNGSIONAL-ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	1 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
						2 Terlaksananya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	2 Jumlah laporan hasil monitoring ETPD
		SEKRETARIS	1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1 Nilai AKIP yang baik	KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN	1 Terlaksananya administrasi keuangan	1 Jumlah laporan administrasi keuangan
				2 Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan		2 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
				3 Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan		3 Tersedianya laporan pertanggungjawaban Keuangan SKPD	3 Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
				4 Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan		4 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian

ESELON II		ESELON III			ESELON IV		
TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG	SASARAN	INDIKATOR	SUB BIDANG	SASARAN	INDIKATOR
				5 Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan		5 Terlaksananya Administrasi Perkantoran	5 Jumlah Laporan Administrasi Perkantoran
			2 Terwujudnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Persentase permasalahan SIPD yang terfasilitasi			

Singaraja, 3 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Sugantha Widiada, M.Si

Pembina/Unggul Muda (IV/c)

NIP. 196703021989011001

CASCADING KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

Sasaran RPD : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Isu Strategis : 1. Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah model Keuangan Daerah masih dibatasi pada kendala-kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi
2. Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya terdapat administrasi sehubungan dengan telah beresnya paradigma pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal
3. Kualitas sumber daya manusia/asarut pemerintahan daerah belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
4. Belum optimalnya identifikasi aset pemerintah daerah

